



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, ada beberapa urusan yang perlu didukung dengan jabatan-jabatan tertentu dalam rangka untuk mendukung visi, misi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Analisis Kebutuhan Jabatan dengan memperhitungkan rasio keseimbangan antara Beban Kerja dan jumlah Jabatan Fungsional pada setiap Perangkat Daerah ditambahkan dua jabatan fungsional yaitu : Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan ketiga pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 8 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 8); dan
- b. Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 9);

diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran ditambah dua angka sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

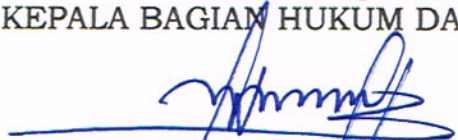
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI SANGGAU**
NOMOR : **5 TAHUN 2017**
TANGGAL : **3 JANUARI 2017**
TENTANG : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN (PERMENPAN DAN RB)	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	INSTANSI PEMBINA
1.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Urusan	Nomor 15 Tahun 2009	1) Sekretariat Daerah 2) Inspektorat Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri
2.	1) Pemeriksa Merek 2) Pemeriksa Paten 3) Perancang Peraturan Perundang-undangan	Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 47/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 1) Sekretariat Daerah 2) Sekretariat DPRD	Kementerian Hukum dan HAM
3.	1) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 2) Pemeriksa Pajak 3) Penyuluh Pajak	Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor PER 04/KEP/2/2006	Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah	Kementerian Keuangan
4.	1) Inspektur Ketenagalistrikan	Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/04/M.PAN/12/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Kementerian Perindustrian
6.	1) Penguji Mutu Barang 2) Penera	Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/05/M.PAN/1/2005 Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/03/M.PAN/1/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan

7.	1) Medik Veteriner	Nomor 52 Tahun 2012	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	Kementerian Pertanian
	2) Paramedik Veteriner	Nomor 53 Tahun 2012	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	3) Pengawas Benih Tanaman	Nomor 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Jo. KEP/137/M.PAN/9/2004	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	4) Pengawas Bibit Ternak	Nomor 2 Tahun 2011	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	5) Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Nomor PER/17/M.PAN/4/2006	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	6) Pengawas Mutu Pakan	Nomor 22 Tahun 2013	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	7) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Nomor PER/10/M.PAN/05/2008	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	8) Penyuluh Pertanian	Nomor PER/02/M.PAN/2/2008	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	9) Analis Pasar Hasil Pertanian	Nomor 6 Tahun 2012 Jo. Nomor 23 Tahun 2013	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
9.	1) Pengendali Frekuensi Radio	Nomor KEP/51/M.PAN/4/2002 Jo. PER/27/M.PAN/11/2004	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kementerian Perhubungan
	2) Pengawas Keselamatan Pelayaran	Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004	Dinas Perhubungan	
	3) Penguji Kendaraan Bermotor	Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2011	Dinas Perhubungan	
10.	1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Nomor 22 Tahun 2010	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	2) Pengawas Perikanan (penggabungan dengan Pengawas Benih Ikan)	Nomor 1 Tahun 2011	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	3) Penyuluh Perikanan	Nomor PER/19/M.PAN/10/2008	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	
	4) Analisis Pasar Hasil Perikanan	Nomor 25 Tahun 2013	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	

11.	1) Pengawas Ketenagakerjaan 2) Instruktur 3) Mediator Hubungan Industrial 4) Pengantar Kerja 5) Penggerak Swadaya Masyarakat	<p>Nomor 19 Tahun 2010</p> <p>Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003</p> <p>Nomor PER /06/M.PAN/4/2009</p> <p>Nomor 06/KEP/MK.WASPAN/2/2000</p> <p>Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Kementerian Tenaga Kerja
12.	1) Teknik Pengairan 2) Teknik Penyehatan Lingkungan 3) Teknik Jalan dan Jembatan 4) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 5) Penata Ruang	<p>Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor PER/10/M.PAN/6/2007</p>	Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan	Kementerian Pekerjaan Umum
13.	1) Administrator Kesehatan 2) Apoteker 3) Asisten Apoteker 4) Bidan 5) Dokter 6) Dokter Gigi 7) Epidemiologi Kesehatan	<p>Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000</p> <p>Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 07/KEP/MK.WASPAN/12/1999</p> <p>Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008</p> <p>Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000</p>	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	Kementerian Kesehatan

8) Entomolog Kesehatan	Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
9) Fisioterapis	Nomor KEP/04/M.PAN11/2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
10) Fisikawan Medis	Nomor PER/12/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
11) Nutrisionis	Nomor 23/KEP/12/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
12) Okupasi Terapis	Nomor PER/123/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
13) Ortosis Prostesis	Nomor PER/122/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
14) Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
15) Perawat	Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
16) Perawat Gigi	Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
17) Perekam Medis	Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
18) Pranata Laboratorium Kesehatan	Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
19) Psikolog Klinis	Nomor PER/11/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
20) Radiografer	Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
21) Refraksionis Optisien	Nomor PER/47/M.PAN/4/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
22) Sanitarian	Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
23) Teknik Elektromedis	Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman

24) Teknisi Gigi	Nomor PER/05/M.PAN/4/2007	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
25) Terapis Transfusi Darah	Nomor PER/06/M.PAN/4/2007	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	
26) Terapis Wicara	Nomor PER/48/M.PAN/4/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	
27) Dokter Pendidik Klinis	Nomor PER/17/M.PAN/9/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	
28) Pembimbing Kesehatan Kerja	Nomor 13 Tahun 2013	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	
14.			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1) Guru	Nomor 16 Tahun 2009	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2) Penilik	Nomor 14 Tahun 2010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3) Pamong Belajar	Nomor 15 Tahun 2010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4) Pengawas Sekolah	Nomor 21 Tahun 2010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5) Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Nomor PER/2/M.PAN/3/2009	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Sosial
6) Pranata Laboratorium Pendidikan	Nomor 3 Tahun 2010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
15.			
1) Pekerja Sosial	Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2) Penyuluh Sosial	Nomor PER/06/M.PAN/5/2008	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
16.			Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pamong Budaya	Nomor PER/09/M.PAN/5/2008	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
17.			
1) Adikara Siaran	Nomor 130/M.PAN/1989	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2) Teknisi Siaran	Nomor 128/M.PAN/1989	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3) Andalan Siaran	Nomor 129/M.PAN/1989	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika
4) Pranata Humas	Nomor PER/109/M.PAN/11/2005	Dinas Komunikasi dan Informatika	


18.	1) Pengendali Dampak Lingkungan 2) Pengawas Lingkungan Hidup	Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Nomor 39 Tahun 2011	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup
19.	Perencana	Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
20.	Analisis Kebijakan	Nomor 5 Tahun 2012	Sekretariat Daerah	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
21.	Arsiparis	Nomor PER/3/M.PAN/3/2009	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Arsip Nasional (ANRI)
22.	1) Analisis Kepegawaian 2) Auditor Kepegawaian 3) Asessor SDM Aparatur	Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 Nomor 40 Tahun 2012 Nomor 41 Tahun 2012	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
23.	Pustakawan	Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
24.	Pranata Komputer	Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	Badan Pusat Statistik
25.	Penyuluh Keluarga Berencana	Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
26.	Surveyor Pemetaan	Nomor 134/ KEP/ M.PAN/ 12/ 2002	1) Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tata ruang dan Pertanahan 2) Dinas Perkebunan dan Peternakan	Badan Koordinasi dan Survey Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)
27.	Auditor	Nomor PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	Inspektorat	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

28.	Pengawas Obat dan Makanan	Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002	Dinas Kesehatan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
29.	Penerjemah	Nomor PER/124/M.PAN/5/2006	Sekretariat Daerah	Sekretariat Negara
30.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Nomor 77 Tahun 2012	Sekretariat Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
31.	Peneliti	Nomor KEP /128/M.PAN/9/2004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI)
32.	Perekayasa	Nomor PER/219/M.PAN/6/2008	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
33.	Penyuluh Hukum	Nomor 3 Tahun 2014	Sekretariat Daerah	Kementerian Hukum dan HAM
34.	Satpol PP	Nomor 4 Tahun 2014	Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri
35.	Widyaiswara	Nomor 14 Tahun 2009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
36.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Nomor 42 Tahun 2014	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kementerian Keuangan Republik Indonesia

37.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nomor 15 Tahun 2009	Inspektorat	Kementrian PAN & RB
-----	---	---------------------	-------------	---------------------

BUPATI SANGGAU,
 ttd
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002